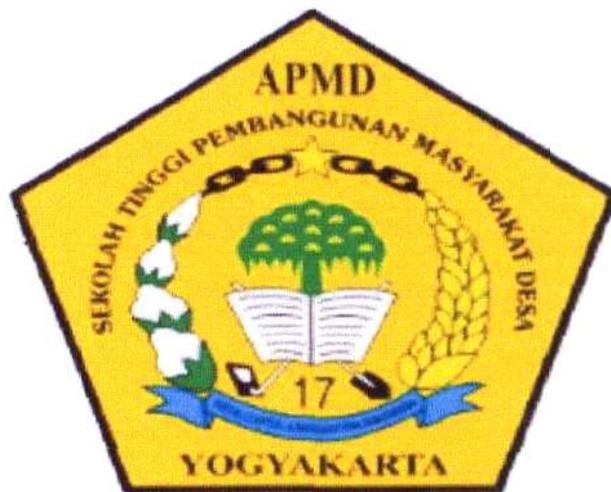


SKRIPSI

**KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMANFAATAN
OBJEK WISATA TEBING BREKSI**

*(Studi Governability di Kelurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan
Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)*



Disusun Oleh :

NESSI MARCETA

18520019

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA

2022



HALAMAN JUDUL

**KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMANFAATAN
OBJEK WISATA TEBING BREKSI**

*(Studi Governability di Kalurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)*

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang

Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh :

NESSI MARCETA

18520019



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Juli 2022

Jam : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STMPD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Drs. Sumarjono, M.Si</u> <u>Ketua Penguji/Pembimbing</u>	
2. <u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> <u>Penguji Samping 1</u>	
3. <u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> <u>Penguji Samping 2</u>	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nessi Marceta

Nim : 18520019

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMANFAATAN OBJEK WISATA TEBING BREKSI” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang telah dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 3 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



(Nessi Marceta)

MOTTO

“Nasib memang diserahkan kepada manusia untuk digarap, tetapi takdir harus ditandatangani di atas materai dan tidak boleh digugat kalau nanti terjadi apa-apa, baik atau buruk”

(Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono)

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata dan yakinlah. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap proses dalam hidup, berpetualanglah”

(Nessi Marceta)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dapat terselesaikan karena tidak lepas dari bantuan dan dukungan doa dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan berkat dari-Nya skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Manto dan Ibu Rosita, yang selalu memberikan dukungan doa, semangat dan nasehat kepada saya. Terima kasih untuk tidak pernah lelah mendoakan dan memberi semangat. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan bangga dengan hasil yang sudah saya peroleh saat ini.
3. Keluarga tersayang saya, yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat untuk saya yaitu adik kandung saya sendiri Yolanda Putri.
4. Dosen pembimbing saya, Bapak Drs. Sumarjono, M.Si. Terima kasih telah memberikan banyak ilmunya kepada saya. Dengan segala kemampuan dan kebaikan hati Bapak telah sabar membimbing, mengarahkan dan mengajarkan saya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan lahir dan batin dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan hidup.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMANFAATAN OBJEK WISATA TEBING BREKSI”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat mutlak dalam memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta sekaligus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dalam bentuk tulisan ilmiah.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan baik moril maupun materildari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan baik dan sabar dalam membimbing, mengarahkan serta mengajarkan penulis selama selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
5. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
6. Seluruh staff dan karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Bapak Wahyu Nugroho, S.E selaku Lurah Kalurahan Sambirejo tempat peneliti melakukan penelitian.

8. Bapak Mujimin, S.Sos selaku Carik Kalurahan Sambirejo yang telah membantu peneliti mendapatkan informasi guna mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Kholik Widiyanto selaku Ketua Pengelola Taman Tebing Breksi yang telah membantu peneliti mendapatkan informasi guna menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman STPMD “APMD” Yogyakarta angkatan tahun 2018 khususnya kelas IP1B.
11. Teman seperjuangan, Putri Ayu Wulandari dan Dwi Yolanda Pratiwi. Terima kasih telah mendukung dan menyemangati selama penyelesaian skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata ijin penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukan penulis selama proses perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua.

Yogyakarta, 3 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. FOKUS PENELITIAN	7
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
E. LITERATUR REVIEW	9
F. KERANGKA KONSEPTUAL	13
1. Kapasitas Pemerintah Kalurahan	14
2. Pemanfaatan Objek Wisata.....	24
G. METODE PENELITIAN.....	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Lokasi Penelitian.....	37
3. Sumber Data	38
a. Data Primer	38

b. Data Sekunder.....	39
4. Subyek Penelitian	39
5. Teknik Pengumpulan Data.....	40
a. Observasi	42
b. Wawancara	43
c. Dokumentasi	44
6. Teknik Analisis Data	46
7. Kesimpulan	49

BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN SAMBIREJO DAN WISATA TEBING BREKSI

A. SEJARAH KALURAHAN SAMBIREJO	50
B. VISI MISI	51
C. STRUKTUR ORGANISASI KALURAHAN SAMBIREJO.....	52
D. KONDISI GEOGRAFIS KALURAHAN SAMBIREJO	53
1. Batas Wilayah	53
2. Pembagian Wilayah Kalurahan Sambirejo	55
E. KEADAAN DEMOGRAFIS KALURAHAN SAMBIREJO	55
1. Jumlah penduduk	56
2. Jumlah keluarga	60
3. Angkatan kerja	61
F. KONDISI EKONOMI.....	63
a. Pengangguran.....	63
b. Kesejahteraan keluarha	65
c. Pendapatan perkapita domesticbruto desa dan pendapatan pendapatan perkapita kalurahan sambirejo	65
d. Penguasaan aset ekonomi masyarakat	72
G. KEADAAN SOSIAL KALURAHAN SAMBIREJO	72
a. Keamanan dan ketertiban masyarakat.....	72
b. Kedaulatan politik masyarakat.....	73
H. OBJEK WISATA TEBING BREKSI.....	75

a. Sejarah tebing breksi	75
b. Kondisi geografis tebing breksi	76
c. Visi dan Misi	78
d. Aktifitas pelaku usaha	79

**BAB III ANALISIS TENTANG KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN
DALAM PEMANFAATAN OBJEK WISATA TEBING BREKSI**

A. KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PEMANFAATAN OBJEK WISATA TEBING BREKSI.....	82
1. Kapasitas regulasi pemerintah kalurahan dalam pemanfaatan objek wisata Tebing Breksi.....	83
2. Kapasitas ekstraktif pemerintah kalurahan dalam pemanfaatan objek wisata Tebing Breksi.....	86
3. Kapasitas distributif pemerintah kalurahan dalam pemanfaatan objek wisata Tebing Breksi.....	89
4. Kapasitas politik pemerintah kalurahan dalam pemanfaatan objek wisata Tebing Breksi.....	91
B. KENDALA-KENDALA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA TEBING BREKSI	95

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	99
B. SARAN	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 deskripsi informan/narasumber	40
Tabel 1.2 teknik pengumpulan data	41
Tabel 1.3 struktur organisasi Kalurahan Sambirejo	52
Tabel 1.4 pembagian wilayah Kalurahan Sambirejo	55
Tabel 1.5 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	56
Tabel 1.6 jumlah penduduk berdasarkan umur atau usia	56
Tabel 1.7 jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	58
Tabel 1.8 penduduk menurut mata pencaharian/pekerjaan	59
Tabel 1.9 jumlah penduduk berdasarkan agama	60
Tabel 2.0 jumlah keluarga menurut tahapan keluarga	60
Tabel 2.1 jumlah penduduk bekerja dirinci menurut umur/usia kerja	61
Tabel 2.2 jumlah penduduk bekerja dirinci menurut pendidikan	62
Tabel 2.3 jumlah penduduk bekerja dirinci menurut jenis pekerjaan	62
Tabel 2.4 jumlah pengangguran dirinci menurut pendidikan	63
Tabel 2.5 jumlah pengangguran dirinci menurut kelompok umur	64
Tabel 2.6 jumlah tahapan kesejahteraan keluarga	65
Tabel 2.7 jumlah kelembagaan keamanan	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Peta Wilayah Kalurahan Sambirejo	54
---	----

INTISARI

Kalurahan Sambirejo merupakan Kalurahan yang terletak di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman. Permasalahan yang terjadi adalah Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Tebing Breksi. Digunakan pemerintah desa dalam kapasitas regulasi, kapasitas ekstraktif, kapasitas distributif, dan kapasitas politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas pemerintah desa dalam kapasitas regulasi adalah pemerintah desa dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan (menerbitkan peraturan-peraturan) dalam mengatur Desa. Pemerintah desa dalam kapasitas ekstraktif adalah pemerintah desa mampu mengoptimalkan pengembangan objek wisata Tebing Breksi. Pemerintah desa dalam kapasitas distributif adalah pemerintah desa bisa membagi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya secara adil dan merata. Pemerintah desa dalam kapasitas politik dalam kapasitas politik dibagi menjadi dua yaitu, kapasitas responsif adalah pemerintah desa membuat perencanaan kebijakan desa sebagai kebutuhan masyarakat dan kapasitas kerjasama adalah pemerintah desa dan masyarakat menjalin kerjasama. Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pemanfaatan Objek Wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode kajiannya adalah deskriptif kualitatif. Untuk lokasi penelitiannya yaitu di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan metode pengumpulan datanya yaitu data Primer melalui observasi, diskusi mendalam dan wawancara serta data Sekunder melalui dokumentasi tertulis, studi pustaka, jurnal dan internet yang digunakan untuk mendukung data Primer.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pemanfaatan Objek Wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta belum berjalan efektif, dengan alasan karena pemerintah desa dalam regulasi objek wisata Tebing Breksi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pemerintah desa dalam ekstraktif objek wisata Tebing Breksi dengan mengembangkan SDM dan SDA. Dan pemerintah desa dalam distributif belum adil dikarenakan masih banyak masyarakat yang merasa belum terpenuhi kebutuhan sehingga belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kalurahan dalam politik sudah bisa berjalan cukup baik, alasannya dalam membuat perencanaan kebijakan untuk bekerjasama sudah sesuai dengan apa yang dibuat di RPJMKal Sambirejo.

Kata Kunci: Kapasitas Pemerintah Desa, Objek Wisata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang tentunya menjadi pusat perhatian khusus saat ini dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, langkah awal untuk menciptakan kemandirian desa sehingga desa dipercaya mampu membangun dan memajukan Indonesia menjadi lebih baik dari saat ini. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanerakargaman wisata dan budaya. Keanekaragaman wisata yang begitu indah merupakan ciri khas yang dimiliki masing-masing daerah. Kekayaan alam dan keberagaman bangsa Indonesia dapat menjadi daya tarik wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara, dengan demikian Indonesia dapat mengembangkan kekayaan akan potensi tersebut menjadi pariwisata.

Pembangunan pada umumnya dan pembangunan pariwisata pada khususnya perlu memperhatikan kondisi daerah serta faktor fisik dan non fisik. Hal ini untuk menghindari kerusakan lingkungan yang berlebihan,

oleh karena itu pembangunan di sektor pariwisata hendaknya memperhatikan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pengembangan masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan adalah pengembangan pariwisata yang memiliki kontribusi tinggi terhadap ekonomi masyarakat setempat, dengan kata lain pengembangan tersebut hendaknya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dan nilai budaya.

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Pasal 6: pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata), Pasal 8: pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional Pasal 11: pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan

kepariwisataan. Serta (Pasal 12: 1) aspek-aspek penetapan kawasan strategis pariwisata). Dalam era globalisasi sekarang ini bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional.

Sektor ini direncanakan selain sebagai salah satu sumber penghasilan devisa yang cukup handal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi, untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung ke arah kemajuan sektor ini, salah satu kebijakan tersebut adalah memanfaatkan objek-objek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Kalurahan Sambirejo terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki banyak potensi yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal. Salah satunya adalah Tebing Breksi.

Sebelum menjadi tempat wisata, Tebing Breksi merupakan tempat penambangan batuan alam. Kegiatan penambangan ini dilakukan oleh masyarakat sekitar. Di lokasi penambangan terdapat tempat-tempat pemotongan batuan hasil penambangan untuk dijadikan bahan dekorasi bangunan. Sejak tahun 2014, pemerintah menutup kegiatan penambangan di Tebing Breksi. Penutupan ini berdasarkan hasil kajian yang menyatakan bahwa batuan yang ada di lokasi penambangan ini merupakan batuan yang berasal dari aktivitas vulkanis gunung Api Purba Nglanggeran. Kemudian,

lokasi penambangan ini ditetapkan sebagai tempat yang dilindungi dan tidak diperkenankan untuk kegiatan penambangan.

Setelah penutupan aktivitas tambang tersebut, masyarakat setempat mendekorasi lokasi bekas pertambangan ini menjadi destinasi wisata pada 30 Mei 2015, akhirnya Sri Sultan Hamengku Buwono X meresmikan Tebing Breksi sebagai tempat wisata baru di Yogyakarta. Saat ini Tebing Breksi berhasil menjadi salah satu destinasi wisata andalan desa wisata Dewi Sambi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tebing Breksi memiliki pesona tersendiri yang membuatnya populer dan layak dikunjungi. Beberapa seniman lokal telah memberikan sentuhan artistik pada dinding tebing, yakni dengan memberikan ukiran-ukiran seni berbentuk relief dan patung dari cerita pewayangan, seperti pahatan Arjuna membunuh Buto Cakil, pahatan Naga dengan mahkotanya, dan juga Patung Semar. Pemandangan dinding Tebing dengan ornamen pahatan juga memberikan daya tarik tersendiri. Tebing ini memang sudah terbentuk jutaan tahun lalu. Meski saat ini bukan lagi tempat penambangan, sisa-sisa dari aktivitas penambangan mampu menghadirkan ornamen pahatan yang membuat tebing ini tampak seperti kue lapis. Berfoto dengan latar tebing sepertinya menjadi kegiatan favorit wisatawan. Tak heran jika tebing ini juga kerap dijadikan lokasi foto bagi para pasangan yang sedang melakukan sesi foto *pre-wedding* atau momen spesial lainnya.

Hal yang paling istimewa, para wisatawan dapat menyaksikan pemandangan alam dan kota Yogyakarta dari atas Tebing Breksi. Bahkan,

aktivitas masyarakat pun dapat terlihat, seperti pesawat lepas landas, kendaraan yang hilir mudik, dan lain sebagainya. Jika kunjungan pada siang hari, jangan lupa membawa kacamata hitam payung untuk menghindari panas. Selain itu, kamu juga bisa membawa air minum sendiri untuk menghindari dehidrasi karena untuk mencapai puncak tebingnya harus menaiki anak tangga. Kawasan Tebing Breksi sejak lama difungsikan sebagai objek tujuan wisata, bahkan Tebing Breksi justru menjadi objek wisata andalan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama bagi Kalurahan Sambirejo. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Kapanewon Prambanan Kalurahan Sambirejo Nomor 11 Tahun 2015-2025 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan daerah, sehingga tolak ukur keberhasilan dari usaha tersebut tidak hanya terbatas pada kesuksesan rencana dan pelaksanaan program pengembangan pembangunan kepariwisataan, akan tetapi seberapa besar sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Oleh karena itu, pentingnya kapasitas pemerintah sebagai regulator dalam penerapan semua Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku mutlak di laksanakan oleh pemerintah. Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan

tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Kapasitas pemerintah sebagai ekstraktif yaitu peranan pemerintah dalam mengoptimalkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas. Sementara itu kapasitas pemerintah sebagai distributif yaitu kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata.

Potensi pariwisata Tebing Breksi perlu dikembangkan dan dibina secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan usaha dan meratakan pendapatan yang pada akhirnya mampu menunjang pembangunan Kalurahan Sambirejo. Mencermati latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat judul *Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pemanfaatan Objek Wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.*

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas latar belakang masalah dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalah penelitiannya adalah Bagaimana Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Pemanfaatan Objek Wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian pada skripsi ini yang berjudul Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pemanfaatan Objek Wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Kapasitas pemerintah kalurahan dalam pemanfaatan objek wisata Tebing Breksi.
 - a. Kapasitas regulasi pemerintah desa dalam pemanfaatan objek wisata Tebing Breksi
 - b. Kapasitas ekstraktif pemerintah desa dalam pemanfaatan objek wisata Tebing Breksi
 - c. Kapasitas distributif pemerintah desa dalam pemanfaatan objek wisata Tebing Breksi
 - d. Kapasitas politik pemerintah desa dalam pemanfaatan objek wisata Tebing Breksi

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengembangkan objek wisata Tebing Breksi.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

- A. Tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas yaitu:

Mengetahui kapasitas pemerintah Kalurahan dalam memanfaatkan objek wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

- B. Sedangkan penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat untuk perkembangan ilmu baik dari teoritis maupun praksis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian diharapkan nantinya dapat menambah dan memperluas informasi untuk mendukung pemanfaatan objek wisata Tebing Breksi.
- b. Dan juga dapat menjadi referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi.

2. Manfaat praksis

- a. Bagi Pemerintah Kalurahan dapat dijadikan sebagai rekomendasi informasi dalam memanfaatkan objek wisata Tebing Breksi.
- b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambahan baru mengenai objek wisata Tebing Breksi.

- c. Bagi peneliti hasil penelitian dapat digunakan sebagai penambahan wawasan baru mengenai pemanfaatan objek wisata Tebing Breksi.

E. LITERATUR REVIEW (Tinjauan Pustaka)

Penelitian terdahulu yang pertama yaitu Pemanfaatan Wisata Mata Air yang Dikelola oleh BUMDesa di Desa Belik. Milik Wafia Silvi Dhesinta Rini, Muhammad Insan Tarigan. Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat 1 (1), 75-81, 2020. Desa Belik berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah wisata atau desa wisata. Potensi yang dimiliki oleh Desa Belik adalah sumber mata air yang lokasinya berada di dalam hutan bambu. Selanjutnya, lokasi hutan bamboo tersebut berada di atas tanah kas desa seluas 4 hektar sehingga pengelolaan dan pemanfaatan terhadap mata air tersebut dapat dijadikan salah satu sumber penerimaan kas desa. Sumber mata air akan terdengar gemericik diantara hutan bamboo yang terletak di Dusun Jibru Desa Belik sehingga menjadi nilai jual tersendiri bagi pengembangan ekowisata ini.

Penelitian yang terdahulu yang kedua adalah milik Andelissa Nur Imran yang berjudul Identifikasi Kapasitas Komunitas Lokal Dalam Pemnfaatan Potensi Ekowisata Bagi Pengembangan Ekowisata di Kawah Cibuni. Jurnal perencanaan wilayah dan kota 23 (2), 85-102, 2012. Ekowisata merupakan bagian dari kegiatan wisata yang bertujuan untuk mengagumi keindahan alam dan budaya dengan tidak memberikan dampak

negatif pada lingkungan (konservasi) dan memberikan keuntungan terhadap komunitas lokal secara ekonomi. Kawah Cibuni yang terletak di daerah Ciwidey, Kabupaten Bandung, merupakan salah satu objek wisata yang memiliki keindahan alam dan budaya yang masih asli, didukung dengan kondisi alamnya yang hijau, alami, dan terdapat penduduk asli yang menempati daerah tersebut. Kawah Cibuni dikenal karena memiliki sumber air panas dan kawah-kawah kecil yang masih aktif di sekitarnya. Kawah Cibuni memiliki kriteria sebagai lokasi ekowisata yang ikut melibatkan peran komunitas lokal dalam pengembangannya.

Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu milik Niken Lestari, Siti Amanah, Pudji Muljono, Djoko Susanto. Yang berjudul Pengaruh Profil Petani Pengelola Agrowisata terhadap Kapasitas Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Digital di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Jurnal Penelitian Agribisnis dan Pembangunan Pedesaan 5 (1), 66-78, 2019. Teknologi komunikasi digital memberikan peluang yang lebih luas bagi petani agrowisata untuk menjangkau pasar lokal dan nasional. Agrowisata sebagai diversifikasi usaha pertanian mendorong petani memiliki kapasitas untuk memanfaatkan teknologi komunikasi digital. Profil petani agrowisata yang berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan kapasitas petani dalam memanfaatkan teknologi komunikasi digital adalah usia, pendidikan formal, penilaian fungsi teknologi komunikasi digital, dan motivasi usaha, sedangkan yang

berpengaruh signifikan adalah pendidikan nonformal, lama usaha, dan produk agrowisata.

Penelitian terdahulu yang keempat dari Okparizan, Asep Sumaryana, Didin Muhafidin, Yogi Suprayogi Sugandi. Yang berjudul Kapasitas Organisasi Dalam Pengembangan Pariwisata Desa: Studi Kasus Desa Wisata Kabupaten Bintan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 8 (1), 9-16, 2019. Kinerja organisasi desa belum optimal dalam memaksimalkan potensi desa wisata. hal ini mengakibatkan desa wisata tidak memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan desa. Indikator yang menjadi tolak ukur kinerja kelembagaan desa belum optimal adalah belum tercapainya tiga sasaran pembangunan pembangunan desa yaitu atraksi wisata, aksesibilitas dan amenitas. Empiris membuktikan bahwa dimensi kapasitas organisasi cenderung tidak memberikan manfaat yang lebih besar dalam pengembangan desa wisata. keseluruhan dimensi kapasitas yang dinilai tidak menunjukkan dukungan kapasitas kerja yang efektif.

Penelitian terdahulu yang kelima dari Sangat Y Londa yang berjudul Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pengusaha di Zona Penyangga Taman Nasional Laut Bunaken Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 10 (2), 63-71, 2020. Masyarakat memanfaatkan potensi dan posisi Taman Nasional Laut Bunaken untuk menunjang kelangsungan hidupnya melalui kegiatan usaha. Untuk menemukan model pengembangan kapasitas masyarakat pelaku usaha di kawasan penyangga Taman Nasional Laut Bunaken. Pengembangan kapasitas masyarakat pada

pelaku usaha terkait dengan aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui dimensi pelatihan pengetahuan dan keterampilan serta pendampingan untuk memotivasi dan mengendalikan perkembangan usaha. Peningkatan kapasitas lembaga usaha terkait dengan penguatan modal usaha, fasilitas usaha dan pengelolaan usaha.

Penelitian terdahulu yang keenam dari Wayan Eny Mariani, I Gede Totok Suryawan yang berjudul Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pelatihan Manajemen Keuangan. Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SINAPTEK) 1, 2018. Kintamani sebagai salah satu tempat wisata di Bali yang paling menarik memiliki beragam potensi wisata mulai dari pemandangan Gunung Batur, pemandian air panas, *tercking*, *camping*, *villa* dan *home stay*. Melihat potensi tersebut, banyak bermunculan usaha di bidang pariwisata yang berbentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Dalam menjalankan operasionalnya, pokdarwis ini mengalami berbagai kendala mulai dari masalah pemasaran, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sehingga masalah lingkungan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dilaksanakan *Focus Group Discussion* yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dan praktisi pariwisata di Bali untuk membahas permasalahan yang dihadapi, perancangan sistem media pemasaran kedua mitra, serta implementasinya.

Berdasarkan beberapa review penelitian terdahulu diatas, disini peneliti melakukan hampir sama dengan penelitian terdahulu, namun kapasitas pada penelitian ini berhubungan dengan perspektif *governability* tentang kapasitas pemerintah yaitu kapasitas regulatif (bagaimana proses membuat aturan), kapasitas ekstraktif (bagaimana mengoptimalkan program pemerintah), kapasitas distributif (bagaimana pemerintah membagi sumber daya sehingga bisa seimbang dan merata), dan yang terakhir kapasitas politik (dilihat dari respon pemerintah dalam kerja sama antar *stakeholder* dan masyarakat) memanfaatkan objek wisata Tebing Breksi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Sambirejo, sehingga para pembaca bisa membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Pada penelitian ini kerangka konseptual berfokus pada *governability* yaitu tentang kapasitas pemerintah kalurahan dalam pemanfaatan objek wisata Tebing Breksi. Pada bagian pertama, penulis akan memahami konsep kapasitas pemerintah desa/kalurahan dan kedua penulis akan memahami konsep pemanfaatan objek wisata.

1. Kapasitas Pemerintah Kalurahan/Desa

Pemerintahan desa/lurah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun yang menyelenggarakan pemerintahan desa/lurah adalah pemerintah desa/kalurahan yaitu kepala desa/lurah dibantu perangkat desa/lurah. Pemerintah desa/kalurahan adalah kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa/lurah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan. Kepala desa/lurah selaku kepala pemerintahan desa/lurah berwenang untuk memimpin pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Disamping itu terdapat lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah desa/lurah atau kepala desa/lurah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa/kalurahan, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas kepala desa/lurah memiliki kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat secara luas ke pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala Desa harus memahami regulasi yang ada. Selain kemampuan memahami aturan, kepala desa juga dituntut mampu menghasilkan aturan dalam bentuk peraturan desa demi kepentingan warganya.

Dalam hubungan dengan pemerintah desa, maka kapasitas berkaitan dengan kemampuan pemerintahan desa (pemerintah desa, BPD serta perangkatnya) dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif

dan efisien dengan memanfaatkan potensi yang ada. Pemerintah desa diharapkan memiliki kapasitas yang mendukung pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan pemerintah desa.

Secara umum kapasitas dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menjalankan tugas pokok, fungsi, menyelesaikan masalah, menargetkan dan mencapai tujuan. Dengan kata lain, pemerintah desa harus memiliki kapasitas mumpuni dan dinilai cukup baik untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya.

Kapasitas merupakan sebuah esensi dan basis otonomi (kemandirian) desa. Kapasitas tidak hanya dipandang sebagai kemampuan sumber daya manusia saja, tetapi juga merupakan suatu hal yang sistematis dan manajerial. Kapasitas pemerintah desa dapat dibagi menjadi kapasitas teknokratik dan kapasitas politik. (Agus Dwiyanto, dkk, dalam Lantikawati, 2018:11).

Kemampuan sebuah sistem politik menurut G. Almod terdiri atas kemampuan regulatif, ekstraktif, dan distributif banyak dipengaruhi oleh tuntutan dari kelompok-kelompok berkepentingan, sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat yang demokratis mempunyai kemampuan responsif yang lebih tinggi dari pada masyarakat non-demokratis. Sementara pada sistem totaliter, perilaku regulatif condong terhadap paksaan, serta lebih menonjolkan kegiatan ekstraktif dan simbolik, hasil dari output yang dihasilkan kurang responsif pada tuntutan sehingga

masyarakatnya cenderung diam dan menerima apapun kebijakan dari pemerintah (Hari dan Winarno, 2010:45).

Dalam kaitannya untuk menerangkan kapasitas teknokratik maka bentuk kapasitas pemerintah desa yang dapat digunakan antara lain adalah:

1. Kapasitas Regulasi (mengatur), yakni kemampuan mengatur kehidupannya sendiri beserta isinya (wilayah, kekayaan dan penduduk) dengan peraturan desa.
2. Kapasitas Ektraktif, yakni kemampuan mengumpulkan, mengarahkan dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan desa dan warga masyarakat.
3. Kapasitas Distributif, yakni kemampuan pemerintah desa membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata secara prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Ketiga kapasitas diatas nantinya akan dielaborasi dengan prinsip tata kelola berupa:

- a. Akuntabilitas, adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggungjawab aparat atas kebijakan mampu proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi.
- b. Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Keadilan, adalah seluruh masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sedangkan untuk menerangkan kapasitas politik, bentuk kapasitas pemerintahan desa yang dapat digunakan antara lain adalah:

1. Kapasitas Responsif, yaitu kemampuan berupa daya tangkap terhadap aspirasi dan kebutuhan warga untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan desa.
2. Kapasitas Jaringan dan Kerjasama, yaitu kemampuan pemerintah desa dan masyarakat dalam menjalin kerjasama dan menjaga hubungan dengan pihak luar.

Untuk melihat seberapa baik kapasitas politik yang dimiliki oleh pemerintah desa maka prinsip-prinsip tata kelola berupa:

- a. Partisipasi, partisipasi dapat dipahami sebagai proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi yang baik adalah ketika masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut aktif berpartisipasi dalam proses kebijakan politik. Namun kenyataannya masih memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam proses kebijakan publik. Partisipasi publik bukan

merupakan fenomena yang muncul dengan sendirinya, melainkan didorong oleh kesadaran dari struktur maupun kultur yang terdapat atau diciptakan dalam masyarakat itu sendiri.

- b. Transparansi, berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait (seperti berbagai Peraturan dan Perundang-Undangan, serta kebijakan pemerintah) dengan biaya minimal. Dengan transparansi dimungkinkan dilakukannya evaluasi lebih politisi dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses informasi kepada seluruh pihak mengenai pelaksanaan kebijakan mulai dari perencanaan, pengelola anggaran, hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan. Ada tiga faktor utama dalam transparansi yaitu:

1. Keseragaman data/informasi yang disampaikan.
2. Ketersediaan data/informasi yang akurat, terupdate, dan komprehensif,
3. Kemudahan mengakses data/informasi.

Cukup banyak definisi kapasitas yang dikemukakan oleh para pakar atau ahli, menurut Morgan “kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melakukan fungsi-

fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu” (Morgan dalam Soeprapto, 2010: 10).

Menurut Freddy Rangkutin (2004: 94) kapasitas ialah tingkat kemampuan dalam memproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas, biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada suatu periode ataupun dalam kurun waktu tertentu. Sementara menurut Samayang (2003: 99) kapasitas adalah tingkat kemampuan dalam memproduksi dari sebuah fasilitas, yang biasanya dinyatakan dalam jumlah volume dimana output dapat dilihat per periode waktu, sehingga peramalan permintaan yang akan datang akan memberikan pertimbangan untuk merancang tingkat kapasitas yang lebih baik dikemudian hari.

Menurut Grindle (1997: 22) kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan:

1. Dimensi pembangunan sumber daya manusia (SDM), dengan fokus, personil yang profesional dan berkemampuan teknis, serta tipe kegiatan seperti training, praktek langsung, kondisi iklim kerja dan rekrutmen.
2. Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus, tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem intensif, perlengkapan personil

kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi dan struktur manajerial.

3. Dimensi reformasi kelembagaan, dengan fokus, kelembagaan dan sistem serta struktur makro, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan reformasi konstitusi.

Dapat kita ambil kesimpulan bahwa aspek manusia (*human capacity*) yang hanya menjadi pemahaman tentang kapasitas di atas. Karena memang dapat kita pahami terkait kapasitas ataupun kemampuan hanya bisa ditilai dari manusia, sulit untuk menentukan kapasitas bila harus ditilai dari hewan yang hanya mengandalkan insting, ataupun menilai suatu kapasitas dari sebuah benda mati yang pada umumnya dibuat oleh manusia itu sendiri. Pada intinya ialah pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama oleh pemerintah desa, sebab SDM yang berkualitas baik ataupun prima akan mampu mendorong terbentuknya kapasitas faktor non manusia secara optimal. Dengan kata lain kapasitas SDM-nya saja, namun juga kapasitas pendukung yang bukan berupa faktor manusia (*non-human capacity*), misalnya sarana dan prasarana atau infrastruktur dan juga keuangan yang mencukupi.

Dari penjelasan kapasitas di atas terdapat tiga elemen penting untuk kapasitas tersebut yaitu:

1. Kebijakan kapasitas, yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah dan memberikan analisis terhadap keputusan.
2. Implementasi kewenangan, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat.
3. Operasional efisien, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif dan efisien serta dengan tingkat kualitas yang memadai.

Berdasarkan pada yang telah diuraikan diatas, dapat dilakukan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu, organisasi dan atau suatu sistem dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, yang kemudian akan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai target dan tujuan bersama dalam sebuah pembangunan. Dan dalam hal kapasitas ini, terdapat tiga elemen penting yang menjadi faktor penjelas teori kapasitas kebijakan kapasitas, implementasi kewenangan dan operasional efisien.

Setiap orang pasti membutuhkan kapasitas untuk melakukan suatu pekerjaan, baik itu di dalam organisasi maupun secara

individual, untuk menghindari terjadi kesenjangan bagi seseorang individu diharapkan selalu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas. Banyak cara yang dilakukan untuk proses perkembangan kapasitas setiap individu, hal ini juga berpengaruh dalam mengurangi kesenjangan antara kemampuan seseorang individu dengan kewajiban yang harus dijalankan dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan.

Pada konteks pemerintah desa untuk melihat kapasitasnya dalam peningkatan pendapatan asli desa maka penguatan kapasitas dari pemerintah desa itu sendiri melalui kualitas dan perangkatnya lewat tingkat pendidikan misalnya, yang seharusnya mampu untuk mempengaruhi dan mencerahkan praktik. Adapun untuk mengukur bagaimana kapasitas pemerintah desa tersebut maka digunakan beberapa indikator yaitu arah kebijakan pemerintah desa dalam pemanfaatan potensi pariwisata, ide program pemerintah desa dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dari peningkatan pendapatan asli desa tersebut.

2. Pemanfaatan Objek wisata

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yang mendapat imbuhan pe-dan-an yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan merupakan suatu proses/aktivitas memajukan sesuatu dianggap perlu untuk ditata sedemikian rupa dengan meremajakan atau memelihara yang sudah berkembang agar menjadi lebih menarik dan berkembang. Pengembangan pariwisata yaitu usaha untuk meningkatkan atau melengkapi fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan agar merasa nyaman saat berada di tempat wisata.

Istilah pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. pari berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang (Yoeti, 1995: 57).

Wisata mengandung unsur-unsur yaitu kegiatan perjalanan, dilakukan secara sukarela, bersifat sementara, dan perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

Pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan baik itu keuntungan bagi wisatawan maupun keuntungan bagi masyarakat setempat. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan manfaat bagi wisatawan maupun masyarakat setempat.

Bagi masyarakat setempat manfaatnya dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya. Namun jika dalam pengembangannya itu maka dipersiapkan dan dikelola dengan sangat baik maka dapat juga menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan wisatawan ataupun masyarakat. Maka dari itu untuk menjamin supaya pariwisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi wisatawan maupun masyarakat maka perlu pengkajian secara mendalam terhadap sumber dan daya pendukungnya.

Pengembangan kepariwisataan tidak luput dari pembangunan berkelanjutan, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata Pasal 5 menyatakan bahwa pengembangan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata kemudian Pasal 6 menyatakan bahwa pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan:

1. Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
2. Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
3. Kelestarian budaya dan lingkungan hidup.
4. Kelangsungan pariwisata itu sendiri.

Dalam penelitian ini pengembangan wisata di objek wisata Tebing Breksi dengan keindahan alam yang dimiliki berupa

pahatan-pahatan batu artistik, bisa melihat kota Yogyakarta yang luas dan menakjubkan, bisa melihat sunset disore hari atau pun sunrise dipagi hari, bahkan bisa melihat candi perambanan atau Candi Ijo. Daya tarik wisata merupakan kekuatan untuk mendatangkan wisatawan. Suatu objek mempunyai potensi untuk menjadi daya tarik wisatawan atau tempat wisata, tetapi untuk membentuk objek tersebut agar memiliki daya tarik maka diperlukan unsur-unsur yang lain seperti aksesibilitas dan fasilitas penunjang lingkungan sekitar objek tersebut mendukungnya.

Pada dasarnya kunjungan wisatawan merupakan kunjungan untuk mencari kesenangan dan kepuasan sehingga harus didukung oleh ketersediaan akomodasi yang memadai. Wisatawan cenderung akan tertarik dengan fasilitas akomodasi yang lengkap yang bisa mendukung aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dan kenyamanan juga perlu diperhatikan agar wisatawan merasa senang dan puas dengan tempat wisata yang dikunjungi.

Pariwisata merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu. Alasannya karena aktivitas berwisata bagi seorang individu dapat meningkatkan daya kreatif, menghilangkan kejenuhan kerja, relaksasi, berbelanja, bisnis, mengetahui peninggalan sejarah dan budaya suatu etnik tertentu, kesehatan dan pariwisata spiritualisme. Dengan dukungan waktu luang maka

aktivitas kepariwisataan akan semakin meningkat. Oleh karena itu program pengembangan objek wisata merupakan hal yang sangat penting demi meningkatnya kualitas objek wisata dan meningkatnya jumlah pengunjung yang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Pengembangan pariwisata adalah suatu bentuk pembangunan dari yang belum ada menjadi ada, dan yang sudah ada menjadi lebih baik dan berkualitas sehingga akan berdampak ke hal-hal yang positif baik itu untuk masyarakat sekitar maupun untuk wisatawan.

1. Objek pariwisata

Pengertian objek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang kesuatu daerah atau tempat tertentu (Marpaunng 2002: 78). Objek dan daya tarik sangat erat hubungannya dengan *travel motivation* dan *travel fashion*. Karena wisatawan ingin mengunjungi serta mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, dinyatakan bahwa objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata baik itu pembangunan objek dan daya tarik wisata yang, dilakukan dengan cara objek dan daya tarik wisata. dalam undang-undang diatas, yang termasuk objek dan daya taruik wisata terdiri dari: pertama, objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud

keadaan alam serta Flora dan Fauna, seperti pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis serta binatang-binatang langka. Kedua, objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia berwujud museum, peninggalan sejarah, seni budaya, pertanian, taman rekreasi dan sebagainya. Ketiga, sarana dan prasarana wisata minat khusus seperti berburu, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat ziarah dan lain-lain. Keempat, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dengan demikian pariwisata meliputi: semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan semata-mata hanya merupakan sumber daya potensial dan belum dapat disebut daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu, misalnya penyediaan aksesibilitas atau fasilitas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa objek dan daya tarik wisata dalam penelitian ini adalah hasil karya manusia di Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo. Menurut SK Menparpostel No. KM 98 PW. 102 MPPT-87 yaitu: “objek wisata adalah suatu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya alam yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik yang diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

2. Kebijakan pengembangan objek dan daya tarik wisata
 - a. Pengembangan objek dan daya tarik wisata menyangkut aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang satu sama lainnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, oleh karenanya pembangunan objek dan daya tarik wisata harus didasarkan pada sitem perencanaan.
 - b. Pengembangan objek dan daya tarik wisata dilakukan berdasarkan pendekatan pembangunan satuan kawasan wisata dengan nuansa nilai agama, budaya, estetika, dan moral yang dianut oleh masyarakat.
 - c. Pengembangan objek dan daya tarik wisata dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar dan meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata pantai dan wisata pertualangan.

3. Upaya pembangunan objek wisata

Upaya yang dapat dilakukan untuk pembangunan objek wisata adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM) bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, seminar, diskusi dan lain sebagainya, khususnya dibidang kepariwisataan. Pendidikan diperlukan sebagai modal tenaga-tenaga yang akan dipekerjakan dalam kegiatan manajerial, sedangkan pelatihan

perlu tugas menerima dan melayani wisatawan dan tenaga kerja produksi.

b. Kemitraan

Pola kemitraan atau kerjasama dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola objek wisata dengan pemerintah desa atau pengusaha pariwisata dalam hal ini Dinas Pariwisata Daerah. Bidang-bidang usaha yang bisa dikerjasamakan antara lain seperti bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan dan sebagainya.

c. Promosi

Objek wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media oleh karena itu desa atau kabupaten harus sering mengundang wartawan atau media cetak maupun elektronik untuk kegiatan promosi tersebut.

d. Festival

Kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi objek wisata tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olahraga dan sebagainya dapat dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

e. Perbaikan infrastruktur pariwisata

Untuk memeperkaya objek dan daya tarik wisata (ODTW) disuatu desa wisata, dapat dibangun berbagai infrastruktur

sebagai antara lain pembangunan *homestay* agar memenuhi persyaratan akomodasi wisatawan atau membangun *guest house* berupa *bamboo house*, *tradisional house*, *log house* dan lain sebagainya. Pembangunan jalan, sumber energi, sarana olahraga, sarana pendidikan, gedung pertunjukan, tempat pembuangan limbah dan sampah, sarana komunikasi, terminal dan lain-lain.

4. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
 - a. Penyiapan sistem perencanaan tata letak dan tata ruang kawasan wisata.

Memberikan arahan yang jelas agar bisa menjadi pengembangan pariwisata berdasarkan karakteristik keruangan melalui zonasi pengembangan. Untuk kemudahan pembangunan dan pengolahan yang perlu dilakukan adalah pengelompokkan objek daya tarik wisata pada satuan kawasan wisata (SKW). Satuan-satuan kawasan wisata tersebut merupakan kawasan yang memiliki pusat-pusat kegiatan wisata agar mempunyai keterkaitan *sirkuit* atau jalur wisata. melakukan urutan prioritas pengembangan satuan kawasan wisata dengan memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan objek dan juga daya tarik wisata.

b. Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan wisata.

Akses informasi dengan adanya kemajuan manusia untuk menyalurkan segala bentuk keinginannya telah menjadikan dunia ini sebagai suatu tempat tanpa batas. Masukan informasi lengkap tentunya akan menyebabkan para wisatawan semakin mudah untuk menyeleksi kawasan-kawasan yang akan dikunjungi. Informasi itu dapat berupa promosi dan publikasi. Promosi adalah kegiatan yang intensif dalam waktu yang relatif singkat. Promosi juga merupakan salah satu program pemasaran. Meskipun suatu produk memiliki kualitas yang baik, namun bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Untuk itu dalam mengadakan promosi yang tepat harus disadari bahwa yang didistribusikan ke pasar itu sering bukan produk yang sudah jadi tapi hanya komponen-komponennya saja atraksinya dan fasilitasnya. Komponen-komponen tersebut masih harus bisa menjadi sebuah produk pariwisata yang lengkap yakni perjalanan ketempat wisata dengan menggunakan sarana angkutan roda empat maupun angkutan roda dua, untuk mengunjungi objek wisata yang ingin dikunjungi. Sedangkan publikasi harus berusaha lebih menyesuaikan produk dengan permintaan pasar, maka publikasi berusaha menciptakan permintaan dan mempengaruhi

permintaan dengan cara menonjolkan kesesuaian produk pariwisata dengan permintaan. Publikasi dapat berupa *pemfelt*, *brosur* serta publikasi lewat media massa.

Akses kondisi jalan menuju objek wisata dan jalan akses itu harus berhubungan dengan prasarana umum. Kondisi jalan umum dan jalan akses menentukan aksesibilitas suatu objek wisata. aksesibilitas ini merupakan syarat yang penting sekali untuk objek wisata. selanjutnya sebagai tempat akhir perjalanan di tempat objek wisata harus ada internal, setidaknya tempat parkir. Baik jalan akses maupun tempat parkir harus sesuai dengan kebutuhan yaitu sesuai dengan jumlah wisatawan yang diharapkan yang diharapkan kedatangannya dan jenis serta jumlah kendaraan yang diperkirakan akan digunakan oleh parkir wisatawan.

Spillane (2000: 23) mengungkapkan bahwa fasilitas fisik adalah sarana yang disediakan oleh pengelola objek wisata memberikan pelayanan dan kesempatan kepada wisatawan menikmatinya. Dengan tersedianya sarana maka akan mendorong calon wisatawan untuk berkunjung dan menikmati objek wisata dengan waktu yang relatif lama. Sarana dan pelayanannya akan memudahkan orang berkunjung ke objek wisata yang diinginkan serta pergerakan dilokasi wisata.

- c. Pemenuhan standar fasilitas di kawasan wisata sesuai dengan kebutuhan.

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan (Sueantoro, 1997: 21).

Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu objek wisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya wisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri. Di samping berbagai kebutuhan yang telah disebutkan diatas, kebutuhan wisatawan yang lain juga perlu disediakan di daerah tujuan wisata seperti bank, apotik, rumah sakit, pom bensin, pusat-pusat pembelanjaan dan sebagainya.

Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata diperlakukan koordinasi yang matang anantara instansi terkait bersama dengan instalasi pariwisata di berbagai tingkatan. Dukungan instansi terkait dengan membangun prasarana wisata

sangat diperlukan bagi pengembangan pariwisata di kalurahan. Koordinasi di tingkat perencanaan yang dilanjutkan dengan koordinasi di tingkat pelaksanaan merupakan modal utama suksesnya pembangunan pariwisata.

Dalam pembangunan prasarana pariwisata pemerintah lebih dominan karena pemerintah dapat mengambil manfaat ganda dari pembangunan tersebut, seperti untuk meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas ekonomi, arus mobilitas manusia antara daerah dan sebagainya yang tentu saja dapat meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja yang dimaksud prasarana adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian, dalam hal ini adalah sektor pariwisata dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi fungsinya adalah melengkapi sarana pariwisata sehingga dapat memberikan pelayanan sebagaimana semestinya.

Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan,

listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. (Suwanto, 2004: 21).

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam penelitian guna mencapai suatu tujuan penelitian, yakni dengan menggunakan teknik analisa dan mengumpulkan data-data dari obyek penelitian disuatu wilayah. Adapun hal-hal yang harus ditentukan dalam metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu wadah untuk menjawab suatu permasalahan secara ilmiah. Penelitian juga merupakan usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi misalnya observasi secara sistematis, dikontrol dan mendasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada. Dalam melakukan suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar dapat memperoleh data yang relevan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan demikian metode penelitian ini memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian tersebut terdapat segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan suatu penelitian dimulai dari meneliti dan penetapan fokus penelitian hingga cara menganalisis data yang diperoleh.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang mana metode deskriptif itu sendiri merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan suatu kelompok manusia, obyek, kondisi, sistem pemikiran dan pariwisata pada masa sekarang. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan temuan yang diamati dan juga melakukan fenomena dengan menetapkan standar dan norma.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya dan lain-lain sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis untuk mencari hasil dari data rumusan masalah penelitian akan mendapat data-data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti ada di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Sumber Data

Sumber data adalah informasi yang berfungsi untuk pusat kajian dalam penelitian. Data itu akan terus dicari dari sumber terkait dengan permasalahan yang di teliti untuk menghasilkan hasil yang baik. Sumber data ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat berdasarkan bukti yang terjadi di tempat dan pencarian permasalahan yang menjadi kendala dalam mengatasi pengembangan objek wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo. Sumber data yang digunakan dari penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang didapat oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada narasumber yang tepat untuk mendapatkan data dari lokasi penelitian dan narasumber yang didapat dipercaya tanpa perantara secara lengkap dari narasumber yang mempunyai kontribusi dan diharapkan mampu memberikan informasi yang terpecaya dan lengkap.

Penggunaan sumber data primer dapatlah mempermudah peneliti untuk mendapat fakta dan data yang perlu untuk penelitian. Karena penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang tepat. Data ini dapat menjadi bukti penelitian karena didapat langsung dari lembaga atau instansi yang menjadi objek penelitian.

Data primer adalah peneliti yang mendapat data langsung baik melalui narasumber.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat oleh orang lain, jadi peneliti tidak langsung memperoleh data dari narasumbernya, peneliti hanya sebagai pemakai data. Didapat dari bahan yang sudah ada atau diolah dari buku, dokumen resmi yang didapat dari kantor pemerintahan, melalui internet maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Sumber data yang digunakan peneliti ketika mencari data menggunakan sumber data yang sudah beredar dan sudah diolah baik itu buku, jurnal dokumen atau foto yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber data ini dapat membantu peneliti memperoleh hasil selama penelitian.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan narasumber yang dipilih oleh peneliti supaya data dapat terkumpul yang dianggap menguasai bidang yang berhubungan dari tema penelitian peneliti. Subyek penelitian ini berhubungan terhadap informasi yang diperoleh penulis waktu pelaksanaan penelitian oleh peneliti dan dapat diberikan data yang lengkap terhadap data yang lengkap terhadap masalah dalam pemikiran.

Subyek penelitian merupakan orang atau lembaga (organisasi) yang akan diteliti.

Tabel 1.1

Deskripsi Informan/Narasumber

No	Nama	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1.	Mujimin,S.Sos	Laki-laki	Strata 1	Carik
2.	Rantini	Perempuan	SLTA/ sederajat	KAUR Pangripta
3.	Kholik Widiyanto	Laki-laki	SLTA/ sederajat	Pengelola Tebing Breksi
4.	Retno	Perempuan	SLTA/ sederajat	Pelaku Usaha
5.	Eva	Perempuan	SLTA/ sederajat	Pelaku Usaha
6.	Anggi	Perempuan	Pelajar	Pelaku Usaha
7.	Wati	Perempuan	SLTA/ sederajat	Pengunjung
8.	Widodo	Laki-laki	SLTA/ sederajat	Pengunjung
9.	Dewi Puspitasari	Perempuan	SLTA/ sederajat	Pengunjung

Sumber data: Data Primer Penelitian 2022

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Hal ini karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk memperoleh data. Maka, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.2**Teknik Pengumpulan Data**

Jenis Data			Teknik Pengumpulan Data
Data Primer	Catatan Lapangan	Hasil Wawancara <ol style="list-style-type: none">1. Carik kalurahan sambirejo.2. Perangkat kalurahan sambirejo.3. Pengelola wisata tebing breksi.4. Kelompok sadar wisata (POKDARWIS).5. Pelaku usaha.6. Pengunjung.	Wawancara dan diskusi mendalam dengan narasumber.
Data Sekunder	Dokumentasi tertulis	<ol style="list-style-type: none">1. Data profil dan demografi kalurahan sambirejo2. RKP dan RPJMKal Sambirejo	Teknik dokumentasi
	Dokumen audio visual	<ol style="list-style-type: none">1. Foto-foto2. Rekaman wawancara	Teknik bahan audio visual

Sumber data: RPJMKal Sambirejo 2021-2026

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan mengumpulkan data yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian melalui panca indra atau dapat juga diartikan sebagai pengamatan dalam pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Observasi dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar dan kebiasaan, adapun teknik observasi juga kemungkinan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya (Lexy J.Moleong, 2002: 125).

Melalui observasi, peneliti dapat mengumpulkan data mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Tujuan menggunakan metode ini adalah untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan dan sebagainya tentang Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pemanfaatan Objek Wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sewaktu kejadian tersebut berlaku sehingga tidak menguntungkan data dari ingatan seorang.

Observasi pada penelitian ini akan dimulai dengan mengamati pembangunan sarana dan prasarana objek wisata Tebing

Breksi yang dibangun atau merupakan inisiatif pemerintah kalurahan dan pengelola, kemudian mengamati promosi objek wisata Tebing Breksi oleh pemerintah kalurahan maupun pengelola, mengamati fasilitas-fasilitas atau sarana prasarana yang tersedia di objek wisata Tebing Breksi dan kendala dalam pengembangan objek wisata Tebing Breksi yang ditemui oleh pemerintah kalurahan maupun pengelola.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan secara langsung antara pewawancara yang biasa disebut *interviewer* dan yang diwawancarai atau yang disebut *interviewee* dan juga sering disebut informan dalam rangka atau proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab dalam sebuah penelitian. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan sedangkan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J.Moleong, 202:125).

Wawancara juga merupakan alat pengumpulan data yang dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada informan atau sumber dengan tujuan untuk memperoleh data yang banyak dan tepat secara langsung. Melalui wawancara ini, peneliti mengumpulkan data mengenai Kapasitas Pemerintah Kalurahan

Dalam Pemanfaatan Objek Wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan menggunakan wawancara ini adalah untuk memperoleh data secara jelas tentang Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pemanfaatan Objek Wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan. Dokumentasi biasanya juga digunakan dalam sebuah laporan pertanggung jawaban dari sebuah acara.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyalin data-data yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Pengambilan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-

data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biasa yang relatif murah, waktu dan tenaga yang dokumentasi ialah biaya yang relatif murah, waktu dan tenaga yang lebih efisien. Sedangkan, kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama dan jika ada yang salah cetak, maka peneliti juga akan ikut salah dalam mengambil data tersebut (Husni Usman dan Purnomo, 2006: 47). Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama (Husni Usman dan Purnomo, 2006: 47).

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber data sekunder untuk melengkapi data primer hasil wawancara yang penulis sudah peroleh dilapangan. Dalam Sudiyono (2008: 225) menyatakan bahwa sumber data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau orang lain.

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan kongkrit tentang

Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pemanfaatan Objek Wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Teknik Analisa Data

Salah satu kaidah penelitian, baik penelitian kuantitatif ataupun kualitatif adalah analisis data. Analisa data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis, data bisa diolah dan bisa disimpulkan, yang pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal-bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya.

Analisa data adalah proses mengorganisasikan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil

berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Menurut *Bogdan dan Biglen* dalam *Moleong*, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang pelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti di hadapkan kepada data yang di peroleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen

resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data (Lexy J.Moleong, 2002: 190).

Dalam menganalisis data dari penelitian ini, peneliti mengungkapkan beberapa langkah utama yaitu reduksi data yang dapat dilakukan dalam abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu di jaga sehingga tetap berada pada penelitian. Langkah selanjutnya adalah penyajian data, langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang di peroleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

7. Kesimpulan

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah verifikasi atau kesimpulan. Tahap ini peneliti mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian-penelitian tersebut.

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN SAMBIREJO

DAN WISATA TEBING BREKSI

A. SEJARAH KALURAHAN SAMBIREJO

Terbentuknya Kalurahan lama Groyokan adalah karena munculnya rijksblat Nomor 11 Tahun 1946 tanggal 15 Mei 1916 dan Sleman menjadi distrik Kabupaten Yogyakarta dan baru tanggal 8 April 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX Kasultanan Yogyakarta melalui koriangka loro (2) wilayah Sleman pada status semata sebagai Kabupaten dengan penguasa Kanjeng Raden Tumenggung Pringgodingrat sebagai Bupati Sleman, pada masa itu wilayah Sleman membawahi 17 Kapanewon dan 258 Kalurahan. Kalurahan Sambirejo yang menurut narasumber Bapak Djumiran, Bapak Mudo Mujono, Bapak Ngatijo dan Bapak Haji Ngadiman, dengan mengambil kebiasaan pada zaman pemerintahan Almarhun Bapak Lurah Wongso Semito bahwa kebiasaan mengadakan pertemuan pada hari Kamis Kliwon, menurut pengamatan pada narasumber kalurahan lama Groyokan yang sekarang disebut Kalurahan Sambirejo berdiri pada:

Hari : Kamis Kliwon

Tanggal : 27 April 1927

Tempat : di kampung Groyokan Nglengkong

Berada di tengah-tengah wilayah kalurahan lama Groyokan sekarang disebut Kalurahan Sambirejo. Mekanisme dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan penguasa Lurah dan perabot dengan cara:

1. Tokoh masyarakat mengajukan nama bakal calon dengan cara menunjuk salah satu tokoh masyarakat dari warga yang ditokohkan di wilayah tersebut,
2. Dalam rembuk deso memilih punggowo/lurah dengan cara acungan bagi nama yang diajukan yang mendapatkan persetujuan suara terbanyak itulah yang ditetapkan menjadi punggowo/lurah.
3. Pada tahap berikutnya dengan cara mengajukan tokoh yang dipandang mempunyai kemampuan kemudian diadakan pemilihan dengan cara bitingan. Bagi yang mendapatkan suara bitingan terbanyak kemudian ditetapkan menjadi punggowo/lurah atau punggowo lainnya.
4. Ada kalanya pernah terjadi punggowo/lurah ditunjuk oleh Doro Siten (asisten) kebondalem yang ditunjuk menjadi lurah adalah bapak Kartodimejo Gunungsari yang menjabat kurang lebih 2 s/d 3 tahun.

B. VISI dan MISI

1. Visi Kalurahan Sambirejo

Terwujudnya Good Governance Pada Pemerintahan Kalurahan Sambirejo Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Dan Pemerataan Pembangunan Kalurahan.

2. Misi Kalurahan Sambirejo

1. Partisipasi
2. Penegakan hukum
3. Transparansi
4. Daya tangkap
5. Berorientasi konsensus
6. Berkeadilan
7. Efektivitas dan efisiensi
8. Akuntabilitas

C. Struktur Organisasi Kalurahan Sambirejo

Berikut merupakan bagan struktur organisasi kalurahan Sambirejo berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan.

Tabel 1.3

Struktur organisasi

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Wahyu Nugroho, S.E	Lurah	Strata I
2.	Mujimin, S.Sos	Carik	Strata I
3	Muryanto	KAUR Danarta	SLTA/sederajat
4	Rantini	KAUR Pangripta	SLTA/sederajat
5.	Tarini	KAUR Tata Laksana	SLTA/sederajat
6.	Tukiman	Jagabaya	SLTA/sederajat
7.	Supandi	Kamituwa	SLTA/sederajat
8.		Ulu-ulu	
9.	Ari Puspitasari, S.Ak	Staff Danarta	Strata I

10.	Ardiyansah Riyan P	Staff Pamgripta	Strata I
11.	Sriyanto	Staff Kamituwa	SLTA/ sederajat
12.	Rudi Santosa, S.E	Staff Ulu-ulu	Strata I
13.	Dwi Hartono	Staff Jagabaya	SLTA/ sederajat
14.	Abdul Azis, S.E	Staff Keseekretarian (arsip & inventaris)	Strata I
15.	Sigit Prasetyo	Staff keseekretarian (teknologi informasi)	SLTA/ sederajat
16.	Restu Hayyu Khoirunnisa, S.Pd	Staff keseekretarian (teknologi informasi)	Strata I
17.	Teguh Widodo	Dukuh Sumberwatu	SLTA/ sederajat
18.	Jumiran	Dukuh Dawang Sari	SLTA/ sederajat
19.	Bagiyo	Dukuh Kikis	SLTA/ sederajat
20.		Dukuh Gedang	
21.	Jaini	Dukuh Mlakan	SLTP/ sederajat
22.	Pardiyono	Dukuh Gunungcilik	SLTP/ sederajat
23.	Maryono	Dukuh Gunungsari	SLTA/ sederajat
24.	Ahmadi	Dukuh Nglengkong	SLTA/ sederajat

Sumber data: RPJMKal Sambierjo 2021-2026

D. KONDISI GEOGRAFIS KALURAHAN SAMBIREJO

1. Batas Wilayah

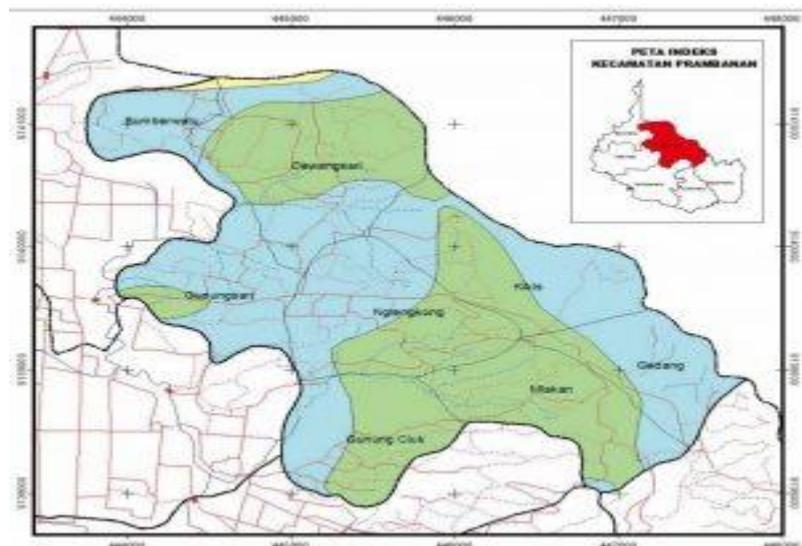
Kalurahan Sambirejo merupakan salah satu kalurahan di Kabupaten Sleman, yang terletak di sebelah Tenggara ibu kota Kapanewon Prambanan yang mempunyai luas 839.6375 Ha dan berada di Koordinat Bujur 110.5088 Koordinat Lintang -7.782435, 90 % menempati pegunungan berbatu dengan tanah liat secara geografis ketinggian

wilayah kurang lebih 300-425m dpl, dengan banyak curah hujan 2000-3000 mm/th dan suhu udara rata-rata 23-32 celcius. Dengan berbatasan langsung dengan :

- Utara : Desa Pereng, Desa Sengon Kecamatan Prambanan Klaten.
- Selatan : Kalurahan Wukirharjo, Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan Sleman.
- Barat : Kalurahan Madurejo, Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan Sleman.
- Timur : Desa Katekan Gantiwarno Klaten, Kalurahan Gayamharjo Prambanan Sleman.

Gambar I.1

Peta Wilayah Kalurahan Sambirejo



Sumber data: RPJMKal Sambirejo 2021-2026

2. Pembagian Wilayah Kalurahan Sambirejo

Pembagian wilayah kalurahan berdasarkan padukuhan, RW dan RT.

Kalurahan Sambirejo memiliki 8 Padukuhan yang terdiri dari :

Tabel 1.4

Pembagian Wilayah Kalurahan Sambirejo

No	Padukuhan	Jumlah	
		RT (Rukun Tetangga)	RW (Rukun Warga)
1.	Sumberwatu	4	2
2.	Dawangsari	4	2
3.	Kikis	7	3
4.	Gedang	5	2
5.	Mlakan	5	2
6.	Gunung Cilik	5	2
7.	Gunungsari	8	3
8.	Nglengkong	7	3

Sumber data: RPJMKal Sambirejo 2021-2026

E. Keadaan Demografis Kalurahan Sambirejo

1. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah unsur terpenting dalam suatu wilayah, karena penduduklah yang melakukan aktivitas untuk mendayagunakan segala potensi yang ada, baik itu potensi alam maupun sumber manusianya. Sesuai dengan data yang diperoleh dari Monografi Kalurahan Sambirejo bahwa jumlah penduduk sebesar 5.861 jiwa dan 1.983 kepala keluarga. Berikut ini merupakan data penduduk :

- a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 1.5

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.892
2.	Perempuan	2.969
Jumlah		5.861

Sumber data: RPJMKal Sambirejo 2021-2026

Berdasarkan data primer jumlah penduduk tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat di Kalurahan Sambirejo penduduk yang lebih banyak ialah berjenis kelamin perempuan dan jumlahnya tidak terlalu jauh dengan jumlah penduduk kelamin laki-laki.

- b. Jumlah penduduk berdasarkan umur atau usia

Tabel 1.6

Jumlah penduduk berdasarkan umur atau usia

No	Kategori Umur	Jumlah
1.	0-1 tahun	80 orang
2.	1-4 tahun	400 orang
3.	4-7 tahun	235 orang
4.	7-13 tahun	547 orang
5.	13-16 tahun	259 orang
6.	16-19 tahun	237 orang
7.	19-24 tahun	386 orang
8.	24-60 tahun	2.260 orang
9.	> 60 tahun	1.478 orang

Sumber data: RPJMKal Sambirejo 2021-2026

Dari tabel diatas dapat diketahui dan dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kalurahan Sambirejo mayoritasnya adalah yang berumur atau berusia 24-60 tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk berusia 24-60 tahun berjumlah 2.260 jiwa lebih tinggi dibandingkan dengan usia lainnya. Dan kemudian jumlah penduduk minoritas yaitu berusia 0-1 dengan jumlah paling sedikit dengan jumlah penduduk 80 jiwa.

c. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang esensial bagi perkembangan masyarakat, pendidikan tinggi dapat mendorong perkembangan intelektual seseorang dalam bermasyarakat, sehingga dengan pendidikan masyarakat dapat menolong dirinya dalam arti masyarakat dapat mengolah sumber daya manusia (SDM) yang ada disekitarnya dan memanfaatkan baik untuk kepentingan pribadinya sendiri maupun bagi lingkungannya untuk mengetahui sejauh mana tingkat pendidikan masyarakat kalurahan Sambirejo dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	313
2.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	993
3.	Tamat SD/ sederajat	1295
4.	Tamat SLTP/ sederajat	905
5.	Tamat SLTA/ sederajat	1210
6.	Tamat D2/ sederajat	5
7.	Tamat D3/ sederajat	19
8.	Tamat S1/ sederajat	55
9.	Tamat S2/ sederajat	2

Sumber data: RPJMKal Sambirejo 2021-2026

Dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat Kalurahan Sambirejo memiliki tingkat pendidikan tamat SD/ sederajat paling tinggi dengan jumlah 1.295 orang dan diurutan kedua masyarakat kalurahan Sambirejo masih banyak juga yang tingkat pendidikannya tamat SMA/ sederajat dengan jumlah 1.210 orang dan yang paling kecil atau sedikit tingkat pendidikan di Kalurahan Sambirejo adalah lulusan S2/ sederajat dengan jumlah 2 orang.

d. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Masyarakat Kalurahan Sambirejo mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang bermacam-macam. Mata pencaharian masyarakat Kalurahan Sambirejo dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.8

Penduduk menurut mata pencaharian/pekerjaan

No	Kategori Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1.275 orang
2.	Buruh Tani	270 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	50 orang
4.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	2 orang
5.	Polri	2 orang
6.	Penambang	75 orang
7.	Tukang Kayu	150 orang
8.	Karyawan Swasta	275 orang
9.	Wiraswasta	40 orang
10.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	609 orang
11.	Ibu Rumah Tangga	1.434 orang
12.	Purnawirawan/Pensiunan	15 orang
13.	Buruh Harian Lepas	1.350 orang
14.	Satpam/Security	11 orang

Sumber data: RPJMKal Sambirejo 2021-2026

Dengan melihat tabel diatas, maka dapat diketahui mata pencaharian penduduk di Kalurahan Sambirejo pada umumnya sebagai buruh harian lepas dengan jumlah sebanyak 1.350 jiwa, kemudian diikuti oleh masyarakat yang berna mata pencaharian petani dengan jumlah sebanyak 1.275 jiwa, namun ibu rumah tangga lebih banyak dengan jumlah sebanyak 1.434 jiwa.

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Jumlah penduduk berdasarkan agama/ penganut terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.9

Jumlah penduduk berdasarkan agama

No	Kategori Agama	Jumlah
1.	Islam	5.784
2.	Kristen	13
3.	Katholik	59
4.	Hindu	5
5.	Budha	0
6.	Khonghucu	0

Sumber data: RPJMKal Sambirejo 2021-2026

Dapat dilihat dari tabel diatas, mayoritas penduduk kalurahan Sambirejo menganut agama islam dengan jumlah sebanyak 5.784 jiwa.

2. Jumlah Keluarga

- a. Jumlah keluarga menurut wilayah dan tahapan keluarga

Tabel 2.0

Jumlah keluarga menurut tahapan keluarga

No	Kategori	Jumlah
1.	PKH (Program Keluarga Harapan)	2.715
2.	Miskin	311
3.	Rentan Miskin	968
4.	Mampu	2.021

Sumber data: RPJMKal Sambirejo 2021-2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PKH (Program Keluarga Harapan) dengan jumlah tertinggi 2.715 jiwa, sedangkan untuk tingkat dua jumlahnya sebanyak 2.021 jiwa. Dan untuk yang tergolong miskin sudah rendah dengan jumlah 311 jiwa.

3. Angkatan Kerja

- a. Jumlah penduduk usia kerja menurut wilayah

Tabel 2.1

Jumlah penduduk bekerja dirinci menurut umur/usia kerja

No	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	15-19 tahun	217	213	430
2.	20-24 tahun	242	253	495
3.	25-30 tahun	351	362	713
4.	31-34 tahun	364	386	750
5.	35-39 tahun	376	385	761
6.	40-44 tahun	253	254	507
7.	45-49 tahun	150	155	305
8.	50-54 tahun	123	132	255
9.	55-59 tahun	87	98	185
10.	60-64 tahun	48	110	158
11.	Usia >65 tahun	23	48	71
Jumlah		2234	2396	4630

Sumber data: RPJMKal Sambirejo 2021-2026

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk bekerja dirinci menurut umur di Kalurahan Sambirejo yang paling banyak bekerja adalah usia 35-39 tahun dengan jumlah 761. Dan yang paling sedikit adalah usia >65 tahun dengan jumlah 71.

- b. Jumlah penduduk bekerja menurut wilayah dan pendidikan.

Tabel 2.2

Jumlah penduduk bekerja dirinci menurut pendidikan

No	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	176	159	335
2.	SD	625	634	1286
3.	SLTP	675	761	1436
4.	SLTA	738	786	1524
5.	DIPLOMA	3	5	8
6.	SARJANA	20	21	41
Jumlah		2264	2366	4630

Sumber data: RPJMKal Sambirejo 2021-2026

Dari tabel diatas dapat dilihat, jumlah penduduk bekerja dirinci dari pendidikan yang paling tinggi ialah SLTA yang jumlahnya paling bannyak yaitu 1524 sedangkan yang paling sedikit adalah DIPLOMA yang berjumlah 8 orang.

- c. Jumlah penduduk bekerja menurut wilayah dan jenis pekerjaan.

Tabel 2.3

Jumlah penduduk bekerja dirinci menurut jenis pekerjaan

No	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sektor Pertanian	1253	836	2089
2.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	32	-	32
3.	Sektor Industri Pengolahan	148	127	275
4.	Sektor Listrik, Gas, Air	42	23	65

5.	Sektor Bangunan	1245	552	1797
6.	Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran	25	45	70
7.	Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	37	8	45
8.	Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	97	54	151
9.	Jasa lainnya	47	18	65
	Jumlah	2926	1663	4589

Sumber data: RPJMKal Sambirejo 2021-2022

Dari tabel diatas, menunjukkan jumlah penduduk bekerja dirinci menurut jenis pekerjaan yang jumlahnya paling banyak adalah sektor pertanian sedangkan yang paling sedikit adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yang berjumlah 45.

F. KONDISI EKONOMI

Gambaran kondisi perekonomian masyarakat, antara lain:

a. Pengangguran

Tabel 2.4

Jumlah Pengangguran Dirinci Menurut Pendidikan

No	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	0	2	2
2.	SD	3	0	3
3.	SLTP	0	0	-
4.	SLTA	0	0	-
5.	DIPLOMA	0	0	-
6.	SARJANA	0	0	-
	JUMLAH	3	2	5

Sumber data: RPJMKal Sambirejo 2021-2022

Berdasarkan tabel diatas, jumlah angkatan tidak bekerja dirinci menurut pendidikan dengan jumlah terbanyak SD yaitu 3 orang sedangkan yang paling sedikit yang pertama SLTP, kedua SLTA, ketiga DIPLOMA, dan yang keempat SARJANA tidak ada jumlahnya.

Tabel 2.5

Jumlah pengangguran Dirinci menurut kelompok Umur

No	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	15-19 tahun	0	0	-
2.	20-24 tahun	0	0	-
3.	25-30 tahun	3	0	3
4.	31-34 tahun	0	0	-
5.	35-39 tahun	0	4	4
6.	40-44 tahun	0	2	2
7.	45-49 tahun	0	5	5
8.	50-54 tahun	0	0	-
9.	55-59 tahun	2	3	5
10.	60-64 tahun	3	4	7
11.	Usia > 65 tahun	8	7	15
Jumlah		16	25	41

Sumber data: RPJMKal Sambirejo 2021-2026

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengangguran dirinci menurut kelompok umur yang paling banyak adalah usia >65 ahun sedangkan yang sedikit ada empat yang pertama yaitu 15-19 tahun, kedua 20-24 tahun, ketiga 31-34 tahun, dan yang terakhir 50-54 tahun.

b. Kesejahteraan keluarga

Tabel 2.6

Jumlah tahapan kesejahteraan keluarga

No	Indikator	Jumlah
1.	Tahapan keluarga sejahtera I (KS I)	2715
2.	Tahapan keluarga sejahtera II (KS II)	968
3.	Tahapan keluarga sejahtera III (KS III)	2021
4.	Tahapan keluarga sejahtera III Plus	311

Sumber data: RPJMKal Sambirejo 2021-2026

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah tahapan kesejahteraan keluarga yang jumlahnya paling banyak adalah tahapan keluarga sejahtera I (KS I) 2715 sedangkan yang paling sedikit adalah tahapan keluarga sejahtera III Plus berjumlah 311.

c. Pendapatan perkapita dan pendapatan domesticbruto Desa dan pendapatan perkapita Kalurahan Sambirejo

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat, strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya dibidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Untuk mengukur tolak ukur kesejahteraan suatu masyarakat suatu masyarakat dapat dihitung dengan menggunakan pendapatan perkapita. Apabila pendapatan perkapita suatu wilayah tinggi maka kemampuan ekonomi wilayah tersebut meningkat, yang mencerminkan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan begitu juga sebaliknya apabila pendapatan perkapita suatu wilayah turun atau rendah maka mekanisme ekonomi di wilayah tersebut sedang lesu.

Pendapatan perkapita (*per capita income*) adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah pada suatu periode tertentu, biasanya dalam periode satu tahun.

Pendapatan perkapita juga biasa diartikan sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB perkapita) atau dalam bahasa Inggrisnya Gross Domestic Product (GDP), yakni jumlah dari nilai barang/jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk wilayah dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam periode satu tahun.

Manfaat dari perhitungan pendapatan perkapita adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat atau standart hidup (*standard of living*) suatu wilayah dari tahun ke tahun. Suatu wilayah dengan PDRB perkapita yang tinggi akan memiliki tingkat *standard of living* yang tinggi dan mencerminkan kualitas hidup yang baik.
2. Untuk melihat apakah pembangunan yang dilaksanakan telah mengalami kemajuan atautakah tidak.
3. Melalui perhitungan pendapatan perkapita, negara bisa mengambil kebijakan di bidang ekonomi yang tepat.
4. Pemerintah dapat melakukan evaluasi apakah kebijakan yang diambil akan berdampak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat atautakah tidak.

Pendapatan perkapita dapat dirumuskan dengan cara menghitung dari pendapatan kalurahan pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduknya pada tahun tersebut. Dengan demikian, pendapatan perkapita dari suatu wilayah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

“Pendapatan perkapita = pendapatan kalurahan tahun t/jumlah penduduk pada tahun t tinjauan PDRM tingkat kabupaten”.

Nilai PDRB Sleman atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 45,83 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 1,63 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 47,47 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh berkurangnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha karena adanya pandemi covid 19 dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 35,29 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 33,91 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Sleman mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif sekitar 3,91%, mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Turunnya nilai PDRB ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak di pengaruhi inflasi. Tinjauan Kalurahan Sambirejo.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang dicipatakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kalurahan Sambirejo didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: industri pengolahan, kontruksi, pertanian dan peternakan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa kepariwisataan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap perkembangan masyarakat di Kalurahan Sambirejo. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sleman pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha industri pariwisata yang dimulai dengan peresmian taman Tebing Breksi pada tahun 2015 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memicu usaha-usaha lainnya di area Tebing Breksi seperti penyediaan akomodasi dengan munculnya jeep wisata yang anggotanya sudah lebih dari 60 unit. Yang diikuti dengan tumbuhnya pedagang kaki lima yang diakomodir oleh pengelola Tebing Breksi yang menghidupi kurang lebih 60 KK diluar pengelola Tebing Breksi yang jumlahnya sudah lebih dari 120 orang. Hal ini menjadikan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan masyarakat yang diharapkan

mampu meningkatkan sektor-sektor lain sehingga ekonomi masyarakat ikut terangkat.

Industri pengolahan didominasi oleh UMKM baik yang bergerak di bidang pengolahan makanan, maupun batik. pengolahan makanan sendiri terdiri dari pengolahan kripik sayur, *snack* makanan, *catering*, dan pengolahan jamu tradisional. Sedangkan batik yang masih berkembang sampai saat ini adalah batik jumput di padukuhan Gedang.

Hampir 25% masyarakat Kalurahan Sambirejo berprofesi sebagai tukang bangunan dan 15% sebagai petani dan peternak. Namun beberapa masyarakat selain berprofesi sebagai tukang bangunan mereka juga beternak, sehingga pengembangan masyarakat dalam sektor tersebut bisa dilakukan secara beriringan.

Pendapatan perkapita salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Sleman atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 31,29 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 38,92 juta rupiah namun kemudian menurun pada tahun 2020 mencapai 37,18 juta rupiah. Turunnya angka PDRB per kapita tersebut disebabkan karena dampak dari pandemi covid-19 yang melanda sepanjang tahun 2020 dan juga di pengaruhi oleh faktor inflasi.

Kenaikan PDRB per kapita secara adil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2016-2016, PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 terus mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Nilai PDRB perkapita sebesar 25,04 juta rupiah di tahun 2016 berangsur-angsur meningkat hingga mencapai 28,93 juta rupiah di tahun 2019 lalu menurun menjadi 27,51 juta rupiah pada tahun 2020.

Jumlah warga di Kalurahan Sambirejo adalah 1,9% dari seluruh warga di Kabupaten Sleman, dikarenakan kalurahan belum melakukan survey secara khusus untuk mengetahui pendapatan perkapita di kalurahan kami, maka dasar yang kami gunakan adalah presentase jumlah penduduk dengan anggapan seluruh kelurahan di Kabupaten memiliki tingkat pendapatan yang sama. Sehingga

pendapatan perkapita di Kalurahan Sambirejo adalah sama dengan pendapatan perkapita di Kabupaten Sleman yaitu 27,51 juta.

d. Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat

Penguasaan aset ekonomi masyarakat terpusat pada beberapa titik yang menjadi penguasaan aset ekonomi masyarakat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, yaitu: Tebing Breksi, Watu Payung, Watu Tapak. Dikembangkannya tempat pariwisata tersebut pada saat ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi tempat wisata yang berlatarkan pemandangan kota Yogyakarta ini, sehingga banyak warga masyarakat yang diberdayakan ditempat wisata ini.

G. KEADAAN SOSIAL KALURAHAN SAMBIREJO

Berisikan gambaran keadaan sosial masyarakat antara lain:

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat

1. Konflik yang terjadi.

Warga Kalurahan Sambirejo menerapkan semangat gotong royong dan kehidupan yang sejahtera serta keamanan yang selalu terjaga dengan ketat. Jadi, tidak pernah terjadi konflik di Kalurahan Sambirejo.

2. Pembagian sistem keamanan lingkungan.

Tabel 2.7

Jumlah kelembagaan keamanan

No	Jenis Kelembagaan	Jumlah
1.	Jaga Warga	120
2.	Poskamling	45
3.	Siskamling	45
4.	Tanggap Bencana	47
5.	Desa Siaga	40
6.	Limnas	51

Sumber data: RPJMKal Sambirejo 2021-2026

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kelembagaan keamanan dengan jumlah terbanyak yaitu jasa warga dengan jumlah 120 sedangkan yang paling sedikit ada dua yaitu Poskamling dengan jumlah 45 dan Siskamling dengan jumlah 45.

b. Kedaulatan politik masyarakat

1. Peran serta masyarakat dalam pembangunan

Peran serta masyarakat dalam pembangunan yaitu berupa gotong royong. Contohnya: gotong royong dalam pembuatan talud, gotong royong dalam pengecoran jalan, dll.

2. Adat istiadat

Adat istiadat di Kalurahan Sambirejo masih sangat terjaga kelestariannya antara lain:

a. Slametan

Slametan adalah sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Slametan adalah bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga, seperti Sepasaran (15 hari manusia lahir), Selapanan (35 hari manusia lahir), Mitoni (7 bulan kehamilan), Wiwit (syukuran atas diberikan hasil panen yang baik).

b. Rasulan

Rasulan adalah salah satu tradisi khas masyarakat Sambirejo. Salah satu kearifan lokal yang patut dilestarikan. Tradisi rasulan yang juga dikenal dengan bersih dusun atau desa yang sudah ada sejak zaman dahulu kala.

c. Selamatan meninggal dunia

Selamatan meninggalnya seseorang. Pelaksanaan selamatan di masyarakat Jawa yaitu selamatan untuk 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, pendak sepisan, pendak pindho dan yang terakhir sebagai puncaknya adalah nyewu (1000 hari).

H. OBJEK WISATA TEBING BREKSI

a. Sejarah Tebing Breksi

Sebelum menjadi tempat wisata, lokasi taman Tebing Breksi sebelumnya adalah tempat penambangan batuan alam. Kegiatan penambangan ini dilakukan sejak 80-an oleh masyarakat sekitar. Di area lokasi penambangan terdapat tempat-tempat pemotongan batuan hasil penambangan untuk dijadikan bahan dekorasi bangunan.

Pada pertengahan tahun 2014, kegiatan penambangan di tempat ini ditutup oleh pemerintah. Penutupan ini berdasarkan hasil kajian yang menyatakan bahwa batuan yang ada di lokasi penambangan ini merupakan batuan yang berasal dari aktivitas vulkanis Gunung Api Purba Semilir. Kemudian lokasi penambangan di tetapkan sebagai tempat yang dilindungi dan tidak diperkenankan untuk kegiatan penambangan. Pada bulan Oktober 2015 kawasan taman wisata Tebing Breksi ditetapkan sebagai salah satu dari *geoheritage* Yogyakarta.

Setelah penutupan aktivitas tambang tersebut, masyarakat mendekorasi lokasi bekas pertambangan ini menjadi tempat wisata yang layak untuk dikunjungi. Pada 30 Mei 2015, tebing breksi ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai tempat wisata baru di Yogyakarta.

Alasan tertentu yang membuat objek wisata Tebing Breksi menjadi salah satu tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pasalnya, potensi wisata alam yang dimilikinya menawarkan banyak hal yang tidak

boleh dilewatkan, diantaranya adalah pemandangan dinding Tebing Breksi dengan ornamen pahatan yang terlihat begitu artistik. Sebab, pada dasarnya tebing ini memang sudah terbentuk jutaan tahun yang lalu dan dijadikan sebagai tempat penambangan. Walaupun saat ini sudah tidak lagi dijadikan sebagai tempat penambangan, tapi sisa-sisa dari aktivitas penambangan tersebut mampu menghadirkan ornamen pahatan yang membuat tebing tersebut tampak seperti kue lapis. Itulah yang menjadi salah satu potensinya, sehingga tebing yang satu ini menjadi sangat menarik untuk dikunjungi.

b. Kondisi Geografis Tebing Breksi

Wisata teman Tebing Breksi merupakan destinasi yang berada di lingkup wilayah administratif Dusun Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Taman Breksi di peta terletak pada titik koordinat 7 46'54"S 110 30'15"E-7.781668, 110.504588. Dengan luas wilayah 274.422,18 m², 84.238,07 m² sudah dikembangkan dan 190.184,11 baru dalam proses pengembangan.

Destinasi wisata taman Tebing Breksi terletak di ketinggian kurang lebih 220 m dari permukaan laut, sehingga taman Tebing Breksi dapat melihat luasnya pemandangan kota Yogyakarta. Wisata taman Tebing Breksi juga termasuk wisata strategis 700 m ke Timur terdapat Candi Ijo, Batu Papal 2,1 km, Watu Payung 3 km. Selatan taman wisata Tebing

Breksi terdapat rumah Domes yang dapat di tempuh jarak 6 km, sisi Barat terdapat Keraton Ratu Boko yang berjarak tempuh 3,3 km, candi Barong 2,2 km, dan candi Banyunibo 1,6 km. Sisi Utara taman Tebing Breksi terdapat Candi Prambanan menempuh jarak 7,2 km, Candi Sojiwan 5,9 km, Candi Miri 2,4 km, dan Spot Riyadi 2,8 km.

Dalam hal orbitasi wilayah destinasi wisata taman Tebing Breksi, jarak destinasi wisata ke kecamatan mencapai jarak 11 km. Lama jarak tempuh ke kecamatan dengan kendaraan bermotor mencapai 18 menit. Lama jarak ke kecamatam dengan berjalan kaki atau kendaraan non-bermotor mencapai 1,5 jam.

Jarak destinasi wisata ke kabupaten mencapai jarak 26,3 km. Lama jarak tempuh ke kabupaten dengan kendaraan bermotor mencapai 45 menit. Lama jarak ke kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non-bermotor mencapai 5 jam 15 menit. Belum tersedianya kendaraan umum kabupaten/kota. Jarak ke ibu kota provinsi mencapai kurang lebih 17 km. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi mencapai dengan kendaraan bermotor mencapai 28 menit. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non-bermotor mencapai 3,27 jam.

c. Visi dan Misi

1. Visi

“terwujudnya tebing breksi sebagai tujuan wisata terkemuka yang bertumpu pada kekuatan dan keunggulan parawisata lokal serta mampu memperkokoh jati diri, memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, serta dapat menjadi lokomotif pembangunan secara menyeluruh”

2. Misi

Mengoptimalkan potensi objek dan daya tarik wisata yang ada di Tebing Breksi sebagai aset utama kepariwisataan.

Membuat perencanaan pembangunan pariwisata taman Tebing Breksi secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian dan pengembangan pariwisata lokal.

Mengoptimalkan potensi objek dan daya tarik wisata yang ada di Tebing Breksi sebagai aset utama kepariwisataan.

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pariwisata bagi pengelola serta masyarakat Desa Sambirejo.

Menumbuhkan sikap sadar wisata pada semua komponen masyarakat Desa Sambirejo.

Memberikan pelayanan prima dan menyiapkan system informasi pariwisata yang memadai.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sambirejo secara material maupun sosial.

d. Aktifitas Pelaku Wisata

Aktifitas pelaku wisata meliputi karyawan Tebing Breksi dan balkondes Sambirejo, pelaku kuliner, lapak, penambang, berkemah, juru foto, dan *jeep* wisata. berikut aktifitas pelaku wisata yang akan menjadi daya tarik wisatawan antara lain:

1. Pengelolaan taman Tebing Breksi (lowo ijo)

Pengelolaan taman Tebing Breksi (Lowo ijo) melakukan pengelolaan dan pengembangan wisata agar menjadi daya tarik wisatawan. Hal ini yang dilakukan merupakan spot-spot baru dengan cara bergotong royong untuk pembangunan dan pengembangan lahan destinasi wisata.

2. Balkondes Sambirejo

Pelaku balkondes Sambirejo menyediakan pelayanan *resto* dan *homestay*. Balkondes Sambirejo juga menyediakan akomodasi sewa tempat untuk acara *wedding*, ulang tahun, dan ruang rapat.

3. Lapak dan kuliner

Pelaku lapak dan kuliner menyediakan berbagai menu makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Pelaku kuliner melakukan pelayanan selalu dengan senyum, salam, dan sapaan terhadap wisatawan. Hal tersebut bertujuan agar wisatawan nyaman saat berada dikawasan wisata taman Tebing Breksi.

4. Kegiatan menambang

Menambang adalah kegiatan dari beberapa warga sekitar taman wisata Tebing Breksi. Saat ini tebing masih ditambang guna merapikan bentuk tebing. Kegiatan menambang juga dapat menjadi bahan edukasi bagi pelajar atau mahasiswa yang berkunjung di taman Tebing Breksi. Wisatawan juga dapat berwawancara atau bertanya jawab langsung dengan wisatawan.

5. Kegiatan perkemahan (watu tapak)

Taman Tebing Breksi menyediakan tempat perkemahan bernama watu tapak. Beberapa pengelola ikut serta menjadi anggota pengurus di Watu Tapak. Lokasi ini sangat menarik unruk tempat perkemahan bagi pelajar, camping keluarga, teman atau pasangan.

6. Pelaku *jeep* wisata

Pelaku *jeep* wisata melayani pengunjung Tebing Breksi yang ingin melakukan *trip* wisata di sekitar taman wisata Tebing Breksi.

7. Kegiatan juru foto

Juru foto menyediakan jasa foto untuk pengunjung yang berada di taman Tebing Breksi. Spot-spot foto yang dimiliki menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke taman Tebing Breksi.

DAFTAR PUSTAKA

- (1999). *ilmu pariwisata*. Jakarta: Akademi Pariwisata Trisakti
- Akhmad, Z. Tuwo, A & Wikantri, R. (2015) *strategi pengembangan destinasi wisata desa bongo*, kabupaten gorontalo. JUMPA Vol, 1, No. 2, ISSN 2406-9116
- Anggraini, Kiki dkk. (2012). *Pengembangan Kapasitas Pegawai Untuk Mewujudkan Good Governance Studi pada Kantor Badan Kepegaiwaan Daerah Kabupaten Malang*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol, 3. No. 7. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
- Ardiansayah, Fadli (2009). *Analisis potensi obyek wisata zone barat kabupaten pacitan tahun 2008*. Sikripsi sarjana surakarta : fakultas geografi UMS
- Asrori (2014) *kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikabupaten kudas*. *Jurnal bina prja edisi juni*. 6 (2): 101-106.
- Damanik, J dan Weber, H. (2006). *Perencanaan Ekowisata dari Teori Ke aplikasi*. Yogyakarta: Andi offeset
- Devy, H, A & Soemanto,R, B. (2017) *Pengembangan objek wisata dan daya tarik wisata alam sebagai daerah tujuan wisata di kabupaten karanganyar*, FISIP UNS : jurnal sosiologi DILEMA, Vol. 32, o.1.
- Fandeli.chafid, (1999). *Dasar-dasar manajemen kepariwisataan kepulauan togeam di kabupaten tojo una-una*. Tesis. Makasar: program studi perencanaan, pengembangan wilayah. Program pascasarjana unversitas hasanuddin
- Gunawan, A. S. Hamidm D & Endang, M. G. W. N. P. *Analisis pengembangan parawisata terhadap sosial ekonomi masyarakat*. *jurnal administrasi bisnis* Vol. 32, No, 1.
- Hardjanto, Imam, (2006), *pembangunan kapasitas lokal (local capacity building)*. Program pascasarjana universitas brawijaya, malang.
- Ilato, Rosman, (2017). *Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance: Upaya Mewujudkan Keseimbangan pPolitik, Akuntabilitas Pemerintah, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Lokal*, Malang: Ideas Publishing

- Karyono, A Haari, (1997). *Kepariwisataan*. Jakarta PT Gramdeis widiasarana indonesia
- Kihin, Ahyani Triyana. (2013), *peran dinas kebudayaan, pariwisata dan kominfo kota samarinda dalam pelestarian budaya adat dayak kenyah di kawasan budaya pampang*.
- Moetheriono (2012). *Percanaan & pengembangan indikator kinerja utama bisnis dan publik*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nasir, M. (2017). *Metode penelitian*, ghalia indonesia
- Ndraha, Taliziduhu, (2003), *Kybermology (ilmu pemerintahan baru)*, Jakarta : PT Pradnya Paramita”
- Nurchayati & Ratnawati, A. T. (2016) *Srategi pengembangan industri kreatif sebagai penggerak destinasi parawisata di kabupaten semarang*. Unisbank semarang : ISBN : 978-979-3649-96-2
- Pendit, Nyoman S. (2002). *Ilmu pariwisata sebuah pengantar perdana*. Jakarta: PT. Pradanya Paramita”
- Poerwadarmita, W.J.S. (2003). *Kamus Umum Bhasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Prafitri G. R dan Damayanti M. (2016). *Kapasitas kelembagaan dalam pengembangan desa wisata (studi kasus desa wisata ketenger, banyumas*. Jurnal pembangunan kota JPK). 4. (1). 76-86.
- Rivai, Veitxhal, (2006). *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*, jakarta: PT. Raja Grafindo
- Salam, dharma setyawan, (2004). *Manajemen pemerintahan indonesia*, jakarta: Djambatan
- Sayfi’inu, kencana. (2001). *Pengantar ilmu politik*. Bandung PT. Refika Aditamam
- Sihite, Rihard. 200. *Tourism industry*. Surabaya : SIC.
- Soebagyo (2012) *strategi pengembangan parawisata di indonesia universitas pancasila : jurnal liquidity* Vol, 1, No. 2, ha; 153-158.
- Soekadijo, (1997). *Anatomi pariwisata: memahami pariwisata sebagai system linkage*. Jakarta: PT Gramdeisa Pustaka Utama
- Soekarno, Soerjono, (2005), *sosiologi suatu pengantar*, jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Wahab, salah, (2003), *manajemen kepariwisataan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Wulandari, L. W. (2014) *pengembangan parawisata ekonomi kreatif desa wisata berbasis budaya sebagai niche marke destination*. Aplikasi bisnis vol. 6, No.9

Yoeti, Oka A, (2001). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Keparawisataan

Dokumen-dokumen lain:

Dokumen Rencana Pembangun Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kalurahan Sambirejo 2021-2026

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman

Dokumen Profil Ojek Wisata Tebing Breksi

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pemerintah desa mengubah penambang batu kapur menjadi objek wisata Tebing Breksi?
2. Apa peran pemerintah desa dalam mengembangkan objek wisata Tebing Breksi tersebut?
3. Bagaimana pemerintah desa mengatur objek wisata Tebing Breksi bisa berkembang seperti sekarang?
4. Apa yang harus dilakukan pemerintah desa untuk mengembangkan objek wisata Tebing Breksi secara optimal?
5. Bagaimana pemerintah desa bisa membagi sumber daya desa secara adil dan merata sehingga bisa mensejahterakan masyarakat desa?
6. Selain pemerintah desa apakah masyarakat juga mempunyai peran dalam mengembangkan objek wisata Tebing Breksi?
7. Apakah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kalurahan Sambirejo ikut terlibat dalam pengembangan objek wisata Tebing Breksi?
8. Program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan objek wisata Tebing Breksi?
9. Bagaimana awal proses atau sejarah pembenukan objek wisata Tebing Breksi?
10. Apakah ada kendala yang dialami saat mengembangkan objek wisata Tebing Breksi?
11. Apakah ada konflik yang terjadi saat mengembangkan objek wisata Tebing Breksi?
12. Bagaimana cara mengatasi kendala dan konflik yang dialami?